



Research Article

**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Desa Cipatujah
Melalui Diversifikasi Produk Kelapa Berbasis
Participatory Action Research (PAR) untuk Mendukung
Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Biru**

Rani Nurnawati

Institut Agama Islam Tasikmalaya, Indonesia

Corresponding Author, Email: raninurnawati70@gmail.com (Rani Nurnawati)



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : June 12, 2026
Accepted : August 13, 2026

Revised : July 14, 2026
Available online : September 12, 2026

How to Cite: Rani Nurnawati. (2026) "Empowerment of the Coastal Community in Cipatujah Village through Coconut Product Diversification Based on Participatory Action Research (PAR) to Support Food Sovereignty and the Blue Economy", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(4), pp. 462-472. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i4.3115.

Empowerment of the Coastal Community in Cipatujah Village through Coconut Product Diversification Based on Participatory Action Research (PAR) to Support Food Sovereignty and the Blue Economy

Abstract. Coastal communities play a strategic role in supporting national food sovereignty, particularly through the sustainable utilization of local resources. Cipatujah Village, as a coastal area, has abundant coconut resources; however, their utilization remains largely limited to raw material sales with low added economic value. This condition results in limited community income and the suboptimal contribution of coastal sectors to the development of the blue economy. This Community Service Program aims to empower the coastal community of Cipatujah Village through coconut

product diversification based on Participatory Action Research (PAR) to support food sovereignty and the blue economy. The PAR approach actively involves the community in all stages of the program, including problem identification, action planning, implementation, and reflection. The program was conducted on November 19 and involved approximately 20 participants from the local coastal community. Activities included capacity building through training on coconut processing into value-added products, hands-on production assistance, and strengthening participants' understanding of food sovereignty and blue economy concepts. Preliminary results indicate an increase in participants' knowledge and skills in coconut product processing, as well as the development of collective awareness regarding the importance of sustainable coastal resource management. This program is expected to serve as a model for local resource-based coastal community empowerment that contributes to economic strengthening and sustainable coastal development.

Keywords: Coastal Community Empowerment, Coconut Product Diversification, Participatory Action Research, Food Sovereignty, Blue Economy

Abstrak. Masyarakat pesisir memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, khususnya melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang berkelanjutan. Desa Cipatujah sebagai wilayah pesisir memiliki potensi kelapa yang melimpah, namun pemanfaatannya masih didominasi oleh penjualan bahan mentah dengan nilai tambah ekonomi yang rendah. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya pendapatan masyarakat serta belum optimalnya kontribusi sektor pesisir terhadap penguatan ekonomi biru. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat pesisir Desa Cipatujah melalui diversifikasi produk kelapa berbasis *Participatory Action Research* (PAR) guna mendukung kedaulatan pangan dan pengembangan ekonomi biru. Metode PAR digunakan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan aksi, pelaksanaan program, hingga refleksi dan evaluasi. Kegiatan dilaksanakan pada 19 November dengan melibatkan sekitar 20 orang peserta yang berasal dari kelompok masyarakat pesisir. Program yang dilakukan meliputi peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan pengolahan kelapa menjadi berbagai produk bernilai tambah, pendampingan praktik produksi, serta penguatan pemahaman mengenai konsep kedaulatan pangan dan ekonomi biru. Hasil awal kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam mengolah kelapa menjadi produk diversifikasi, serta tumbuhnya kesadaran kolektif mengenai pentingnya pemanfaatan sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi model pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis potensi lokal yang berkontribusi terhadap penguatan ekonomi masyarakat dan pembangunan pesisir yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Diversifikasi Produk Kelapa, Par, Kedaulatan Pangan, Ekonomi Biru

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir merupakan salah satu kawasan strategis dalam pembangunan nasional karena memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan berpotensi besar dalam mendukung ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Mardani, 2019; Romli, 2024). Salah satu komoditas unggulan wilayah pesisir di Indonesia adalah kelapa, yang tidak hanya berfungsi sebagai bahan pangan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi tinggi apabila diolah menjadi berbagai produk turunan. Namun demikian, pada banyak wilayah pesisir, termasuk Desa Cipatujah, potensi kelapa belum dimanfaatkan secara optimal. Masyarakat pesisir Desa Cipatujah pada umumnya masih mengandalkan penjualan

kelapa dalam bentuk bahan mentah dengan harga yang relatif rendah (Rasyid et al., 2022). Pola pemanfaatan tersebut menyebabkan nilai tambah ekonomi yang diperoleh masyarakat sangat terbatas, sehingga berimplikasi pada rendahnya tingkat pendapatan dan kesejahteraan. Selain itu, keterbatasan pengetahuan, keterampilan, serta akses terhadap teknologi pengolahan menjadi faktor penghambat dalam pengembangan usaha berbasis kelapa. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi sumber daya lokal dan kemampuan masyarakat dalam mengelolanya secara produktif dan berkelanjutan (World Bank, 2017).

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, penguatan kedaulatan pangan dan ekonomi biru menjadi isu strategis yang perlu diimplementasikan hingga tingkat komunitas lokal (Latifah & Abdullah, 2023). Kedaulatan pangan menekankan pada hak masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi lokal, sedangkan ekonomi biru berorientasi pada pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa merusak ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang partisipatif dan kontekstual agar masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek pembangunan. *Participatory Action Research* (PAR) dipandang sebagai pendekatan yang relevan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat karena menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam proses perubahan sosial (Cahyani, 2024; Greenwood & Levin, 2007; Lewin, 1946). Melalui PAR, kegiatan pemberdayaan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada proses refleksi bersama, pembelajaran kolektif, dan aksi nyata yang berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat pesisir Desa Cipatujah melalui diversifikasi produk kelapa berbasis PAR guna mendukung kedaulatan pangan dan pengembangan ekonomi biru.

METODE PENELITIAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Desa Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, pada tanggal 19 November 2025, dengan melibatkan sekitar 20 orang peserta dari kelompok masyarakat pesisir. Peserta terdiri atas pelaku usaha kecil berbasis kelapa dan warga yang bergantung pada sumber daya pesisir. Pemilihan lokasi dan peserta didasarkan pada potensi kelapa yang melimpah serta kebutuhan masyarakat akan peningkatan kapasitas pengolahan dan nilai tambah produk lokal (Kementerian Kelautan dan Perikanan [KKP], 2021). Pendekatan yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR), yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek utama dalam seluruh rangkaian kegiatan pengabdian (Kemmis & McTaggart, 2014). Pelaksanaan PAR dilakukan melalui tahapan identifikasi masalah dan potensi melalui diskusi kelompok dan observasi partisipatif, perencanaan aksi secara kolaboratif, pelaksanaan pelatihan dan pendampingan diversifikasi produk kelapa, serta refleksi dan evaluasi kegiatan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara singkat, dan diskusi reflektif, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan dampak kegiatan terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat dalam mendukung kedaulatan pangan dan ekonomi biru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Cipatujah menunjukkan respons positif dari masyarakat pesisir yang terlibat. Pada tahap awal kegiatan, hasil identifikasi masalah mengungkapkan bahwa sebagian besar peserta belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai diversifikasi produk kelapa. Pemanfaatan kelapa masih terbatas pada penjualan kelapa utuh atau pengolahan tradisional dengan nilai tambah ekonomi yang rendah. Temuan ini menegaskan adanya kebutuhan mendesak akan intervensi pemberdayaan berbasis peningkatan kapasitas dan keterampilan. Setelah pelaksanaan pelatihan dan pendampingan, terjadi peningkatan pemahaman peserta mengenai potensi kelapa sebagai bahan baku berbagai produk olahan bernilai tambah. Peserta mulai mengenal konsep diversifikasi produk kelapa, seperti pengolahan kelapa menjadi produk pangan olahan dan produk turunan sederhana yang dapat dikembangkan pada skala rumah tangga. Peningkatan pengetahuan ini menjadi modal awal yang penting dalam mendukung kedaulatan pangan berbasis sumber daya lokal.

Dari perspektif ekonomi biru, kegiatan ini mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemanfaatan sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Melalui pendekatan PAR, masyarakat tidak hanya menerima materi pelatihan, tetapi juga terlibat aktif dalam proses diskusi dan refleksi mengenai dampak ekonomi dan lingkungan dari aktivitas mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi biru yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan pesisir. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif melalui PAR efektif dalam meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) masyarakat terhadap program pemberdayaan. Keterlibatan aktif peserta dalam setiap tahapan kegiatan mendorong terbentuknya komitmen bersama untuk melanjutkan praktik diversifikasi produk kelapa secara mandiri. Dengan demikian, kegiatan PKM ini tidak hanya menghasilkan peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga memperkuat kapasitas sosial masyarakat pesisir dalam mengelola potensi lokal secara berkelanjutan.

Penguatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya lokal yang muncul dalam kegiatan ini menunjukkan terjadinya proses pemberdayaan yang bersifat transformatif. Pemberdayaan tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga sebagai perubahan cara pandang masyarakat terhadap potensi ekonomi yang selama ini terabaikan. Perspektif ini sejalan dengan pandangan bahwa pembangunan berbasis masyarakat harus menempatkan komunitas lokal sebagai aktor utama dalam proses perubahan sosial dan ekonomi (Chambers, 2017). Dalam konteks masyarakat pesisir Cipatujah, kelapa tidak lagi dipahami semata sebagai komoditas konsumsi rumah tangga, melainkan sebagai sumber nilai tambah ekonomi yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Pendekatan partisipatif yang digunakan dalam kegiatan ini memperkuat proses pembelajaran kolektif di tingkat komunitas. *Participatory Action Research* (PAR) menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah hingga refleksi hasil (World Bank, 2017). Melalui mekanisme diskusi, praktik bersama, dan evaluasi partisipatif, masyarakat tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif, tetapi turut memproduksi pengetahuan berdasarkan

pengalaman empiris mereka. Proses ini berkontribusi pada meningkatnya rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap program yang dijalankan.

Dari aspek ekonomi, diversifikasi produk kelapa berfungsi sebagai strategi adaptif dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi pesisir. Ketergantungan pada satu jenis mata pencaharian menjadikan rumah tangga pesisir rentan terhadap fluktuasi pasar dan perubahan lingkungan. Diversifikasi sumber pendapatan telah lama dipandang sebagai mekanisme penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan dan pesisir (Masuroh & Mardani, 2025). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengolahan kelapa menjadi berbagai produk turunan membuka peluang ekonomi baru yang relatif mudah diakses oleh masyarakat dengan modal terbatas. Penguatan ekonomi lokal yang berbasis pada sumber daya pesisir juga memiliki relevansi kuat dengan konsep ekonomi biru. Ekonomi biru menekankan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan inklusif secara sosial (Cahyani, 2024). Praktik pengolahan kelapa yang dikembangkan dalam kegiatan ini mencerminkan prinsip tersebut, karena mengoptimalkan bahan baku lokal tanpa menghasilkan limbah berlebihan serta melibatkan masyarakat secara langsung sebagai pelaku utama rantai nilai ekonomi.

Selain aspek ekonomi, dimensi sosial menjadi faktor penting dalam keberlanjutan pemberdayaan masyarakat pesisir. Modal sosial berupa kepercayaan, jejaring sosial, dan nilai gotong royong berperan sebagai perekat dalam proses kerja kolektif. Modal sosial terbukti meningkatkan efektivitas tindakan bersama dan memperkuat kapasitas komunitas dalam mengelola sumber daya lokal (UNEP, 2018). Dalam konteks Cipatujah, kerja kelompok dalam pengolahan produk kelapa memperlihatkan bahwa solidaritas sosial menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan program pemberdayaan. Lebih jauh, keterkaitan antara pemberdayaan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan menunjukkan bahwa pembangunan pesisir harus dipahami sebagai sistem sosial-ekologis yang saling terhubung. Ketahanan masyarakat pesisir sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam mengelola sumber daya alam secara adaptif dan berkelanjutan (Mardani, 2019). Oleh karena itu, diversifikasi produk kelapa tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada penguatan kesadaran ekologis masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir.

Secara konseptual, temuan ini menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis PAR dan diversifikasi produk lokal merupakan strategi yang relevan dalam mendukung kedaulatan pangan dan pengembangan ekonomi biru. Keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari capaian ekonomi jangka pendek, tetapi juga dari terbentuknya kapasitas sosial, kemandirian, dan kesadaran kolektif masyarakat (Chambers, 2017). Dalam perspektif pembangunan berbasis masyarakat, perubahan pola pikir (*mindset shift*) merupakan indikator penting keberhasilan intervensi pemberdayaan. Transformasi ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses refleksi kritis yang berulang. Pendekatan PAR memungkinkan terjadinya dialog horizontal antara fasilitator dan masyarakat, sehingga pengetahuan tidak diposisikan sebagai sesuatu yang ditransfer melainkan dikonstruksi bersama (Mardani, 2020). Dalam kegiatan ini, proses diskusi dan praktik

pengolahan kelapa berfungsi sebagai ruang refleksi kolektif yang mendorong masyarakat mengevaluasi praktik ekonomi tradisional mereka secara kritis.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan memperkuat legitimasi sosial program. Ketika masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan, mereka cenderung menunjukkan tingkat komitmen yang lebih tinggi terhadap keberlanjutan program (Abduh & Mardani, 2024). Hal ini terlihat dari munculnya inisiatif lokal untuk melanjutkan produksi dan pemasaran produk kelapa secara mandiri pasca kegiatan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan tidak berhenti pada tahap pelatihan, tetapi berlanjut pada fase internalisasi nilai kemandirian ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi politik pesisir, diversifikasi produk kelapa juga dapat dibaca sebagai upaya mengurangi ketimpangan struktural yang selama ini menempatkan masyarakat pesisir pada posisi marjinal dalam rantai nilai ekonomi. Ketergantungan pada tengkulak dan pasar tradisional sering kali menyebabkan rendahnya posisi tawar masyarakat. Dengan mengolah kelapa menjadi produk bernilai tambah, masyarakat secara perlahan mampu memutus ketergantungan tersebut dan meningkatkan kontrol terhadap proses produksi dan distribusi (Mauludi & Mardani, 2022). Peningkatan kontrol ini merupakan elemen kunci dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi lokal.

Konsep kedaulatan pangan yang diusung dalam kegiatan ini juga menemukan relevansinya pada level rumah tangga. Kedaulatan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga dengan hak masyarakat untuk menentukan sistem pangan mereka sendiri (Bene et al., 2016; Mardani et al., 2023). Pemanfaatan kelapa sebagai bahan pangan dan produk olahan memberikan alternatif sumber pangan yang lebih beragam dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga pesisir. Dengan demikian, diversifikasi produk kelapa berkontribusi pada dimensi ekonomi dan pangan secara simultan. Dalam kerangka ekonomi biru, pengelolaan sumber daya kelapa di wilayah pesisir harus dipahami sebagai bagian dari ekosistem ekonomi yang lebih luas. Ekonomi biru menekankan integrasi antara sektor darat dan laut, serta pentingnya inovasi berbasis sumber daya lokal (Fauzi, 2019). Pengolahan kelapa menjadi berbagai produk turunan mencerminkan prinsip inovasi tersebut, karena memanfaatkan potensi darat pesisir yang sering kali terabaikan dalam diskursus pembangunan kelautan. Integrasi ini memperluas makna ekonomi biru dari sekadar eksploitasi sumber daya laut menjadi penguatan ekonomi pesisir secara holistik.

Aspek keberlanjutan lingkungan juga menjadi dimensi penting dalam pembahasan ini. Pemanfaatan kelapa yang optimal berpotensi mengurangi limbah organik dan mendorong praktik ekonomi sirkular di tingkat lokal. Dalam konteks ketahanan sosial-ekologis, kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan merupakan prasyarat utama adaptasi terhadap perubahan lingkungan (Aripin, 2025). Kegiatan ini memberikan landasan awal bagi pengembangan praktik ekonomi yang lebih ramah lingkungan di wilayah pesisir Cipatujah. Modal sosial yang terbangun selama proses pemberdayaan memainkan peran strategis dalam menopang keberlanjutan program. Kepercayaan antaranggota kelompok, norma kerja sama, dan jaringan sosial lokal memperkuat kapasitas kolektif masyarakat dalam mengelola usaha bersama (Putnam, 2000). Modal sosial ini tidak

hanya berfungsi sebagai perekat sosial, tetapi juga sebagai sumber daya produktif yang memfasilitasi pertukaran informasi, pembagian peran, dan pengambilan keputusan bersama. Dalam konteks usaha berbasis komunitas, modal sosial sering kali menjadi faktor penentu keberhasilan yang melampaui aspek teknis dan finansial.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan berbasis PAR memiliki implikasi penting bagi pengembangan kebijakan publik di wilayah pesisir. Kebijakan pemberdayaan yang bersifat *top-down* cenderung kurang responsif terhadap kebutuhan lokal dan sering kali gagal menciptakan dampak berkelanjutan (Pargament, 2011; Thaliya & Amrina, 2023). Sebaliknya, pendekatan partisipatif yang mengedepankan pengetahuan lokal dan pengalaman masyarakat dapat menjadi model alternatif dalam perumusan kebijakan pembangunan pesisir yang lebih inklusif dan kontekstual. Dalam konteks akademik, temuan ini memperkuat argumen bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir harus dipahami sebagai proses multidimensional yang mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis. Pendekatan yang terlalu sempit pada peningkatan pendapatan semata berisiko mengabaikan dimensi sosial yang justru menjadi fondasi keberlanjutan program (Mulastih et al., 2024; World Bank, 2017). Oleh karena itu, integrasi antara penguatan kapasitas ekonomi dan pembangunan modal sosial menjadi kunci dalam merancang program pemberdayaan yang efektif.

Secara reflektif, pembahasan ini juga membuka ruang untuk pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat selanjutnya. Skala kegiatan yang relatif kecil memberikan peluang untuk replikasi dan pengembangan model pemberdayaan di wilayah pesisir lain dengan karakteristik serupa. Diversifikasi produk kelapa dapat dikombinasikan dengan inovasi pemasaran digital atau penguatan kelembagaan ekonomi lokal untuk memperluas dampak program (Masuroh & Mardani, 2025). Dengan demikian, kegiatan ini dapat diposisikan sebagai model awal (*pilot model*) dalam pengembangan ekonomi biru berbasis komunitas. Pembahasan ini menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat pesisir tidak hanya terletak pada capaian output yang terukur, tetapi juga pada proses pembelajaran sosial yang berlangsung di dalam komunitas. Transformasi kesadaran, penguatan kapasitas kolektif, dan peningkatan kontrol masyarakat atas sumber daya lokal merupakan indikator utama keberhasilan program (Fauzi, 2019). Dengan landasan tersebut, pemberdayaan masyarakat pesisir melalui diversifikasi produk kelapa berbasis PAR memiliki potensi kuat untuk mendukung kedaulatan pangan dan pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Implikasi kebijakan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui diversifikasi produk kelapa berbasis *Participatory Action Research* (PAR) menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang berorientasi pada penguatan kapasitas komunitas memiliki relevansi tinggi untuk diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan pesisir. Temuan kegiatan ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama, serta memanfaatkan potensi sumber daya lokal, mampu menghasilkan dampak yang lebih berkelanjutan dibandingkan intervensi yang bersifat *top-down*. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengadopsi kebijakan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan ekonomi pesisir.

Pada tingkat kebijakan desa, model pemberdayaan ini dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan desa melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau kelompok usaha bersama. Diversifikasi produk kelapa berbasis kelompok memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai unit usaha desa yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli desa sekaligus memperkuat ekonomi rumah tangga pesisir. Integrasi kebijakan semacam ini penting agar hasil pengabdian kepada masyarakat tidak berhenti sebagai praktik temporer, melainkan menjadi bagian dari sistem pembangunan desa yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, implikasi kebijakan juga mencakup perlunya pendekatan lintas sektor dalam pembangunan pesisir. Penguatan ekonomi berbasis kelapa tidak dapat dilepaskan dari kebijakan lingkungan, pendidikan masyarakat, dan pengembangan usaha mikro. Prinsip ekonomi biru menekankan pentingnya sinergi antar sektor dalam mengelola sumber daya pesisir secara berkelanjutan (Mardani, 2019). Dengan demikian, kebijakan pembangunan pesisir perlu dirancang secara integratif agar mampu menjawab kompleksitas persoalan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dihadapi masyarakat pesisir. Dari perspektif replikasi model, pendekatan pemberdayaan berbasis PAR dan diversifikasi produk lokal memiliki tingkat adaptabilitas yang tinggi. Model ini tidak bergantung pada teknologi canggih atau modal besar, sehingga relatif mudah diterapkan di wilayah pesisir lain dengan karakteristik sosial-ekonomi yang serupa (Abdurohman et al., 2022). Namun, replikasi tidak boleh dimaknai sebagai penyeragaman praktik, melainkan sebagai proses adaptasi kontekstual yang menghargai pengetahuan dan kebutuhan lokal masing-masing komunitas.

Replikasi model yang efektif mensyaratkan adanya proses pemetaan partisipatif pada tahap awal untuk mengidentifikasi potensi, tantangan, dan dinamika sosial masyarakat setempat. Pendekatan ini memastikan bahwa program yang direplikasi memiliki legitimasi sosial dan relevansi kontekstual. Dengan demikian, keberhasilan model tidak hanya ditentukan oleh desain program, tetapi juga oleh kualitas proses partisipatif yang menyertainya. Selain itu, potensi replikasi model ini membuka peluang penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat. Perguruan tinggi berperan sebagai fasilitator pengetahuan dan inovasi, sementara pemerintah daerah menyediakan kerangka kebijakan dan dukungan kelembagaan. Kolaborasi semacam ini memperkuat posisi pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian integral dari ekosistem pembangunan daerah. Secara keseluruhan, implikasi kebijakan dan potensi replikasi model PKM yang dibahas dalam bagian ini menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir melalui diversifikasi produk kelapa berbasis PAR memiliki signifikansi yang melampaui skala lokal. Dengan dukungan kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan komunitas dan mekanisme replikasi yang adaptif, model ini berpotensi berkontribusi pada penguatan kedaulatan pangan dan pengembangan ekonomi biru berbasis masyarakat secara lebih luas.

KESIMPULAN

Program pemberdayaan masyarakat pesisir melalui diversifikasi produk kelapa berbasis *Participatory Action Research* (PAR) menunjukkan bahwa pendekatan

partisipatif yang berorientasi pada potensi lokal merupakan strategi yang efektif dalam memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan kelembagaan masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi mendorong tumbuhnya rasa kepemilikan (*sense of ownership*) dan tanggung jawab kolektif terhadap keberlanjutan program. Diversifikasi produk kelapa tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas lokal dan pendapatan rumah tangga, tetapi juga berfungsi sebagai medium pembelajaran sosial yang memperkuat modal sosial, kepercayaan, dan solidaritas antaranggota komunitas. Melalui proses PAR, masyarakat mengalami peningkatan kapasitas dalam aspek teknis produksi, manajerial, dan kewirausahaan, sekaligus mengalami transformasi kesadaran kritis mengenai pentingnya pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak semata diukur dari capaian ekonomi jangka pendek, melainkan dari terbentuknya kemandirian, daya adaptasi, dan kemampuan masyarakat dalam merespons tantangan struktural ekonomi dan lingkungan secara kolektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atas dukungan pendanaan dan fasilitasi yang memungkinkan terlaksananya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini secara optimal. Apresiasi juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Cipatujah, para tokoh masyarakat, serta seluruh peserta kegiatan atas partisipasi aktif, komitmen, dan kerja sama yang konstruktif selama seluruh tahapan program berbasis *Participatory Action Research* (PAR). Penulis turut mengucapkan terima kasih kepada tim pelaksana dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan teknis, akademik, dan moral

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., & Mardani, D. (2024). Empowering Resilient Livestock Communities: Sustainable Green Economic Independence. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, Query date: 2025-11-27 11:03:59. https://www.al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/1885
- Abdurohman, D., Putra, H., & Ahyani, H. (2022). Sumber Dan Norma Ekonomi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Perbankan Syariah Dan Koperasi Syariah. *Ecobankers: Journal of ...*, Query date: 2025-11-27 11:03:59. <https://jurnal.uibbc.ac.id/index.php/EcoBankers/article/view/878>
- Aripin, I. (2025). AYAT-AYAT AL-QURAN TENTANG PEMELIHARAAN LINGKUNGAN. *Ahwaluna| Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Query date: 2025-11-27 11:03:59.
- Bene, C., Arthur, R., Norbury, H., Allison, E. H., Beveridge, M., Bush, S., Campling, L., Leschen, W., Little, D., Squires, D., Thilsted, S. H., Troell, M., & Williams, M. (2016). Contribution of fisheries and aquaculture to food security and poverty

- reduction: Assessing the current evidence. In *World Development* (Vol. 79, p. 196). <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.11.007>
- Cahyani, Y. (2024). Pembiayaan Berparadigma Green Financing Dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan. *Niqosiya: Journal of Economics and Business ...*, Query date: 2025-11-27 11:01:30.
- Chambers, R. (2017). *Can we know better? Reflections for development*. Practical Action Publishing.
- Fauzi, A. (2019). *Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan: Teori dan aplikasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Greenwood, D. J., & Levin, M. (2007). *Introduction to action research: Social research for social change*. SAGE Publications.
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2023). Prespektif Maqashid Syariah: Peran Ekonomi Hijau Dan Biru Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals. *JISEF: Journal ...*, Query date: 2025-11-27 11:01:30. <http://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/JISEF/article/view/1128>
- Lewin, K. (1946). Action research and minority problems. *Journal of Social Issues*, 2(4), 34-46. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1946.tb02295.x>
- Mardani, D. (2019). Spritual entrepreneurship dalam pemberdayaan ekonomi umat: Studi terhadap Tarekat Idrisiyah Pageningan Tasikmalaya. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, Query date: 2025-11-27 11:03:59. https://mail.al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/68
- Mardani, D. (2020). Creative Economy Empowerment through the Use of Natural Ingredients to Become a Hand Sanitizer in Pager Gunung Singkup Pubaratu. *Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Query date: 2025-11-27 11:03:59. <https://journal.arrus.id/index.php/mattawang/article/view/175>
- Mardani, D., Masuroh, I., Pursita, W., & ... (2023). Religion and Ecology: Environmental Ethics in Maintaining the Food and Energy. *TEMALI: Jurnal ...*, Query date: 2025-11-27 11:03:59. https://www.researchgate.net/profile/Dede-Mardani/publication/370780270_Religion_and_Ecology_Environmental_Ethics_in_Maintaining_the_Food_and_Energy/links/65cab7fb1bed776ae34cdc8b/Religion-and-Ecology-Environmental-Ethics-in-Maintaining-the-Food-and-Energy.pdf
- Masuroh, I., & Mardani, D. (2025). Artificial intelligence dan pendidikan pendidikan islam: Sebuah pendekatan holistik implementatif. *INTEGRATIF| Jurnal Magister ...*, Query date: 2025-11-27 11:03:59. <https://journal.iaitasik.ac.id/index.php/Integratif/article/view/481>
- Mauludi, S., & Mardani, D. (2022). Financial distress analysis at Bank Muamalat for 2016-2020. *Journal of Islamic Economics ...*, Query date: 2025-11-27 11:03:59. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JIEMB/article/view/11791>
- Mulastih, L., Rohmah, U., Hardayu, A., & ... (2024). The Role Of Village-Owned Enterprises In Increasing Green Economic Development In Villages. *Journal Of Human And ...*, Query date: 2025-11-27 11:01:30. <http://www.jahe.or.id/index.php/jahe/article/view/592>
- Pargament, K. I. (2011). *Spiritually integrated psychotherapy: Understanding and addressing the sacred*. Guilford Press.

- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Rasyid, S., Purnomo, E., & ... (2022). Discourse analysis of online news on green economy and blue economy for sustainable development: The case in Indonesia. ... : *Journal of ...*, Query date: 2025-11-27 11:01:30. <https://periodicos.unievangelica.edu.br/index.php/fronteiras/article/download/5681/4381>
- Romli, M. (2024). Integrasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Hijau (Green Economy) Di Indonesia. *Ekomadania: Journal of Islamic Economic and ...*, Query date: 2025-11-27 11:01:30. <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ekomadania/article/view/7471>
- Thaliya, A., & Amrina, D. (2023). Green Economy and Partnership Program in the Tofu Processing Industry: Towards Social-Economic Systems Driving Sustainable Development. *Journal of ...*, Query date: 2025-11-27 11:01:30. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3529960&val=20171&title=Green%2oEconomy%2oand%2oPartnership%2oProgram%2oin%2othe%2oTofu%2oProcessing%2oIndustry%2oTowards%2oSocial-Economic%2oSystems%2oDriving%2oSustainable%2oDevelopment>
- UNEP. (2018). *Blue economy: Sharing success stories to inspire change*. United Nations Environment Programme.
- World Bank. (2017). *The potential of the blue economy: Increasing long-term benefits of the sustainable use of marine resources for small island developing states and coastal least developed countries*. World Bank Group.